

**KEBIJAKAN PROGRAM PEMBINAAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) ANAK JALANAN (KAJIAN KASUS DI
BEBERAPA DAERAH)**

Riko Riyanda
Universitas Putera Batam

Abstract

This paper is about street children's problem in some areas in Indonesia such as in Bandung, Makassar, Batam, and Jogjakarta. The problems of street children should be paid serious attention by the central government as well as local government. These problems are caused by inequality of access to economic and education. It will lead to poverty, urbanization, and unemployment. Therefore, some ways out are needed to run by government and social foundations or any community. Among four cities, each city has different problems and different way in handling the problems. Appropriate policies and guidance programs are some ways to overcome the problems which are implemented precisely and sustainable. However, social foundations and any community hands are also needed to solve the problem of street children.

Keywords: Policy, Guidance Program, Street Children

Pendahuluan

Tulisan ini membahas tentang kebijakan dan program pembinaan anak jalanan (Kajian Kasus beberapa daerah di Indonesia. Salah satu masalah sosial yang terkait dengan kebijakan publik bidang kesejahteraan sosial adalah masalah anak jalanan yang menjadi sorotan publik dan perlu mendapat perhatian pemerintah pusat dan daerah untuk menanggulangnya. Permasalahan sosial tersebut merupakan masalah publik yang mendesak untuk ditangani melalui suatu pendekatan pelayanan yang transparan dan akuntabel. Perlindungan dan pembinaan terhadap anak jalanan harus mendapat perhatian serius oleh pemerintah daerah.

Menurut pakar pemerhati sosial Nurhadjmo keberadaan anak jalanan merupakan fenomena yang jamak ditemui di negara-negara yang sedang berkembang.

Pembangunan yang tidak merata menjadi salah satu penyebab munculnya anak jalanan. Ketimpangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan rendahnya aksesibilitas pendidikan menyebabkan munculnya fenomena anak jalanan di perkotaan. Anak jalanan merupakan kaum marginal perkotaan yang teralienasi dan tersubordinasi dari kemegahan kota. Mereka sangat berpotensi mendapat perlakuan yang diskriminatif seperti perlakuan secara semena-mena oleh petugas atau dari sesama anak jalanan yang lebih besar, terjerumus minuman keras, obat-obatan, kekerasan fisik, terserang penyakit menular, pelacuran sampai pada eksploitasi dan pemaksaan seksual. (Yudiatmaja, 2013: 1).

Senada dengan argumen Nurhajadmo, pakar pemerhati sosial Ricardo Capelo mengatakan keberadaan anak jalanan adalah salah satu masalah sosial yang kompleks dan bertalian dengan masalah sosial lain, terutama kemiskinan. Menangani anak jalanan tidaklah sederhana. Oleh sebab itu, penanganannya pun tidak dapat disederhanakan. Strategi intervensi maupun indikator keberhasilan penanganannya dilakukan secara holistik mengacu pada visi atau *grand design* pembangunan kesejahteraan dengan memperhatikan karakteristik anak jalanan, fungsi dan model penanganan yang diterapkan (Indra Gunawan, 2014: 1).

Fenomena merebaknya anak jalanan telah menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah maupun masyarakat para pengguna jalanan. Perkembangan permasalahan kesejahteraan sosial di kota-kota besar di Indonesia cenderung meningkat ditandai dengan munculnya pengaruh globalisasi, industrialisasi dan derasny arus infomasi dan urbanisasi. Sementara masalah sosial menjadi konvensional masih berlanjut termasuk keberadaan anak jalanan, serta adanya pelaku eksploitasi, merupakan beban dari Pemerintah di berbagai daerah. Permasalahan tersebut merupakan kenyataan sosial kemasyarakatan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, kebodohan, urbanisasi, ketiadaan lapangan pekerjaan, sulitnya mendapatkan pelayananan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Sebagian besar anak jalanan yang ada di daerah berasal dari daerah lain sehingga jumlahnya sulit dikontrol. Keberadaan anak jalanan cukup banyak dieksploitasi oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan kapasitas sarana dibandingkan dengan jumlah anak jalanan menjadi kendala pembinaan anak jalanan selama ini. Sehingga pembinaan terhadap setiap anak jalanan hanya bisa dilakukan beberapa kali saja, selanjutnya dilepas kembali. Kendala lainnya dalam penanganan anak jalanan adalah kurang tersedianya lapangan pekerjaan bagi mereka

meski sudah berkali pelatihan keterampilan. Akibatnya, anak jalanan itu tetap kembali ke jalan setelah selesai menjalani pembinaan (Nuraisyah, 2014).

Pemahaman Definisi Anak Jalanan

Secara khusus anak jalanan menurut PBB adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan untuk bekerja, bermain atau beraktivitas lain. Anak jalanan tinggal dijalanan karena dicampakkan atau tercampakkan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat terlarang. (“Pengertian Anak Jalanan,” 2016)

Anak jalanan dapat dipahami sebagai anak yang karena sebab-sebab tertentu masuk ke dalam kehidupan jalanan untuk tujuan mencari nafkah dan memperoleh penghasilan. Anak jalanan merupakan bagian dari komunitas kota, mereka menyatu dengan kehidupan jalanan kota, dimana jalanan menjadi lapangan hidup, tempat memperoleh pengalaman hidup dan sarana untuk mencari penyelesaian masalah ekonomi maupun sosial. Keberadaan mereka menjadi salah satu ciri kehidupan perkotaan terutama kota-kota besar, sehingga hampir tidak ada kota tanpa anak jalanan. Salah satu sektor pekerjaan informal yang digeluti anak jalanan saat ini adalah sebagai pengemis, mengumpulkan barang-barang bekas dan menjual koran di jalanan yang semakin marak berkembang di kota-kota besar.

Perkembangan dan permasalahan anak jalanan cukup marak seiring dengan dinamika pertumbuhan kehidupan ekonomi di lingkungan mereka berada. Perkembangan dan permasalahan anak jalanan cukup marak seiring dengan dinamika pertumbuhan kehidupan ekonomi di lingkungan mereka berada. Perkembangan kehidupan anak jalanan di perkotaan, keberadaannya sangat identik dengan munculnya kantong-kantong kemiskinan di beberapa wilayah perkotaan. Mereka mencari kebutuhan hidupnya di tempat-tempat umum sebagai pengemis, penjual koran dan mencari barang-barang bekas untuk dijual ssebagai mata pencarian mereka dalam menghidupi diri mereka dan keluarganya.

Mereka telah mengabaikan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan dan pembinaan mental, padahal mereka adalah anak-anak bangsa yang telah dijamin oleh negara sebagai aset bangsa dan sumber daya manusia masa depan. Akan tetapi karena

mereka juga aset keluarga maka mau tidak mau harus ikut bekerja pada sektor informal demi untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Dalam pengertian ini penting digaris bawahi kata anak pada istilah anak jalanan sebagai dasar pemahaman tentang permasalahan mereka. Dengan menempatkan anak jalanan pada konteks anak, maka permasalahan anak jalanan dapat dicermati dari sejumlah hak yang semestinya diperoleh anak pada umumnya sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak pada bab 2 pasal 2 disebutkan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar
2. Hak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan baik selama dalam kandungan maupun sesudah melahirkan
4. Hak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan dan menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Selanjutnya dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipasi secara optimal harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut yang diatur dalam undang-undang menunjukkan secara tegas bahwa setiap anak yang dijamin oleh negara. pemenuhan akan hak-hal konstitusional tersebut merupakan bagian dari amanah konstitusi negara yang dibebankan kepada pemerintah untuk mengatasinya.”

Karakteristik Anak jalanan

Menurut penerlitan Depaertemen sossial dan UNDP do Jakarta dan Surabaya (BKSN, 2002:2-4), anak jalanan dikelompokkan dalam empat kategori:

1. Anak jalanan yang hidup dijalan dengan kriteria:
 - Putus hubungan atau lama tidak lama ketemu dengan orang tuanya

- 8-10 jam berada di jalanan untuk bekerja (mengamen, mengemis, memulung) dan sisanya menggelandang/tidur
 - Tidak lagi sekolah
 - Rata-rata berusia di bawah 14 tahun
2. Anak jalanan yang bekerja, dengan kriteria:
- Berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - 8-16 jam berada di jalanan
 - Mengontrak kamar sendiri bersama teman, ikut orang tua/saudara umumnya di daerah kumuh
 - Tidak lagi sekolah
 - Pekerjaan: penjual koran, pengasong, pencuci bus, pemulung, penyemir sepatu
 - Usia rata-rata di bawah 16 tahun
3. Anak yang rentan menjadi anak jalanan dengan kriteria:
- Bertemu teratur setiap hari/tinggal dan tidur dengan keluarganya
 - 4-5 jam bekerja di jalanan
 - Masih bersekolah
 - Pekerjaan: penjual koran, penyemir sepatu, pengamen, dll
 - Usia rata-rata di bawah 14 tahun
4. Anak jalanan berusia di atas 16 tahun dengan kriteria:
- Tidak lagi berhubungan /berhubungan tidak teratur dengan orang tuanya
 - 8-24 jam bekerja di jalanan
 - Tidur di jalanan atau di rumah orang tua
 - Sudah tamat SD atau SLTP, tapi sudah tidak bersekolah lagi
 - Pekerjaan: calo, mencuci bis, menyemir, dll.

Prototipe Permasalahan Anak Jalanan Di Berbagai Daerah Di Indonesia

1. Kota Bandung

Penelitian yang dilakukan oleh Sr.Tjahjorini, Margano Slamet, Pang S.Asngari dan Djoko Susanto tentang Persepsi Anak Jalanan Terhadap Bimbingan Sosial Melalui Rumah Singgah Di Kota Bandung. Penelitiannya ini dilatarbelakangi anak-anak menghabiskan waktunya di jalan atau di tempat umum lainnya. Pemerintah melalui departemen sosial mengembangkan program rumah transit yang mengcover bimbingan sosial bagi anak jalanan, tetapi keuangan tidak mengcover semua anak-anak.

Banyak anak-anak yang masih di jalanan karena mereka di luar kontrol dan mudah terjebak dengan kenakalan remaja. Penelitian ini mencoba untuk memahami persepsi anak-anak di bimbingan sosial proram rumah transit. (Tjahjorini, Slamet, S.Asngari, & Susanto, 2005)

Penerlitan ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif serta menganalisa non parametik statistik. Bandung merupakan lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dimana kota ini merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki masalah anak jalanan. Populasi dalam penelitian ini adalah anak-anak umur 6 –18 tahun. Teknik sampling statistik random digunakan terhadap 60 koresponden. Data dikumpulkan melalui jadwal wawancara, obervasi lapangan dan studi kasus.

Sejauh ini belum ada kepastian seluruh anak jalanan di Indonesia. Perkiraan yang didasarkan pada data gelandang dan pengemis, sedikitnya terdapatnya 50 ribu orang anak jalanan. Kasus yang terjadi di Kotamadua Bandung memperlihatkan jumlah anak jalanan mencapai 11.000 orang. Namun tidak semua dari jumlah tersebut menerima bimbingan sosial sehingga masih banyak anak jalanan yang bersifar lair karena tidak ditangani oleh rumah singgah atau lembaga-lembaga yang menangani anak jalanan, sehingga mereka cenderung rawan terhadap tindakan yang menentang norma dan nilai yang berlaku di masyarakat.

Menyadari hal ini, maka diperlukan upaya penanganan permasalahan anak jalanan yang salah satunya dilakukan melalui rumah singgah yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dengan pembina rumah singgah yang bertindak sebagai agen perubahan yang juga bertindak sebagai penyuluh yang berupaya menolong agar orang tersebut dapat menolong dirinya sendiri atau “help people to help themselves”. Namun demikian ada keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menangani anak jalanan.

Permasalahan yang terjadi di Kota Bandung adalah Lembaga Swadaya Masyarakat tidak memiliki kapasitas menangani proyek berskala besar karena sekalipun kemauan membantunya sangat besar, namun jumlah stafnya minin dan mereka juga sering kali tak memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk menangani masalah anak jalanan. Karenanya jika tidak ada kerjasama antara lembaga Swadaya Masyarakat dan pemerintah maka akan mengakibatkan karya lembaga swadaya masyarakat seringkali terlalu kecil untuk terasa manfaatnya bagi masyarakat luas.

Keterbatasan kemampuan tersebut, sedikit banyak akan berpengaruh pada pelayanan yang diberikan. Padahal bila mengingat rumah singgah memiliki pembina yang dipandang sebagai agen perubahan sekaligus sebagai penyuluh, diharapkan kondisi tersebut tidak terjadi.

Benang merah dari hasil penelitiannya adalah persepsi responden terhadap program bimbingan sosial negatif dalam hal fisik, mental, sosial dan skill. Responden yang terlibat dalam program ini kurang atau sama dengan 6 bulan lebih baik dari yang dilibatkan 7-12 bulan atau lebih dari 13 bulan, terutama dalam hal bimbingan mental dan skill. Berdasarkan temuan reorientasi program dibutuhkan melalui bentuk bimbingan dan paket konsling dalam waktu yang singkat kurang dari 6 bulan. Relevansi ketertarikan dan kemampuan pengembangan skill anak-anak tetapi tidak fokus pada fisik, mental dan pengembangan sosial.

2. Kota Makassar

Penelitian yang dilakukan oleh Ronawati Anasiru yang berjudul implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi keberadaan anak jalanan di Kota Makassar, kebijakan penanggulangan, implementasi kebijakan, mengenali faktor pendukung dan penghambat model-model kebijakan penanganan serta mencari alternatif penanggulangan untuk menjangkau hasil yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan model studi kasus.

Dari analisis hasil penelitian didapatkan gambaran bahwa implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar menggunakan beberapa tahapan pelaksanaan. Dalam pelaksanaannya digunakan empat model pendekatan yakni: (1) Model pendekatan berbasis panti sosial atau *institutional based services*, (2) Model pendekatan berbasis keluarga atau *family based services*, (3) Model pendekatan berbasis masyarakat atau *community based services* dan (4) model pendekatan berbasis semi panti sosial atau *half-way house services*. Adanya *political will* dan kemauan keras serta keseriusan Pemda Kota Makassar dalam hal ini Walikota Makassar untuk menjadikan Makassar menjadi kota yang aman, tertib dan bebas dari anak jalanan, yang penanggulangannya dilakukan oleh para pelaksana program melalui model-model pendekatan di atas, sangat mendukung program penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait pemerintah dan

swasta serta masyarakat dalam menanggulangi anak jalanan merupakan suatu hambatan dalam implementasi model-model kebijakan penanggulangan anak jalanan di Kota Makassar. (Anasiru, 2011)

Dalam Penelitiannya tersebut mendeskripsikan saat ini anak jalanan menjadi masalah serius terjadi di Kota Makassar. Keberadaan mereka kerap kali menimbulkan berbagai masalah lalu lintas, ketertiban dan keamanan perkotaan. Saat ini Kota Makasar berkembang pesat, bangunan fisik, pusat perbelanjaan dan tempat rekreasi. Terjadi penggusuran liar dan pasar tradisional. Urbanisasi pencari kerja sektor informal, buruh dan tukang becak dari kabupaten lain makin meningkat. Kondisi ini memberi indikasi makin meningkatnya keluarga miskin dan anak yang turun ke jalanan untuk mencari nafkah. Kemiskinan masih merupakan masalah besar, kurang lebih 71.624 kk/368.124 jiwa atau 28,1% penduduk miskin. Kota Makasar menjadi sumber penyebab utama dari permasalahan anak jalanan, di samping itu mentalitas karakter masyarakat untuk memanfaatkan charity (belas kasihan) yang menciptakan perilaku anak jalanan. Kebiasaan perilaku masyarakat pengguna jalan yang memiliki solidaritas tinggi terhadap permasalahan kemiskinan menjadi peluang penghasilan bagi anak jalanan dan keluarga/orang tuanya.

Hasil penelitian Balai Besar Pendidikan dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta tahun 2006, isu anak jalanan di Kota Makasar bukan saja dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan juga faktor budaya. Mereka anak jalanan mulai melanggar nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini nampak pada perilaku anak jalanan yang berusaha mendapatkan uang untuk digunakan bermain judi, minum minuman keras dan merokok, anak jalanan ini mulai terkontaminasi perilaku orang dewasa (preman jalanan).

Di samping itu anak-anak yang terjun sebagai pekerja informal tersebut, bukan karena miskin semata, akan tetapi lebih pada persoalan mentalitas, mereka tidak memiliki semangat atau motivasi memikirkan masa depannya, mereka mudah terpengaruh ajakan orang dewasa untuk dieksploitasi menjadi pengemis. Bahkan dalam usia yang masih belia mereka tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dewasa ini. selain itu orang tua mereka belum berperan penting dalam berkembangnya mentalitas anak jalanan sehingga kehidupannya menjadi semakin terpuruk. Suatu isu yang menarik tentang permasalahan anak jalanan di Kota Makasar adalah adanya oknum yang mengkoordinir anak jalanan. Oknum ini di lingkungan anak

jalanan disebut “BOS” atau KOMANDAN. Oknum inilah yang merekrut anak-anak dan orang tuanya untuk menjadi pengemis.

3. Kota Batam

Di Kota Batam pusat rehabilitasi dan rumah singgah bukankah solusi mengatasi masalah anak jalanan. Permasalahan anak jalanan tidak akan selesai hanya dengan membangun banyak rumah singgah dan rehabilitasi, karena anak jalanan hanyalah hasil dari sekian banyak persoalan sosial kemiskinan, ketiadaan lapangan pekerjaan, dan masalah-masalah lain menyusul meningkatnya urbanisasi di Kota Batam. Begitu pula program dan upaya pemerintah dalam menghilangkan anak jalanan hanya menjadi slogan saja. Penyebabnya kepedulian dan keberadaan rumah singgah sendiri di Batam sangat minim dan kurangnya pendampingan yang intensif terhadap permasalahan anak jalanan. (Haluankepri.com, 2010)

Seperti keberadaan pusat rehabilitasi panti berlokasi di daerah Sambou, Nongsa yang dibangun Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batam. Tempat ini rencanya akan dijadikan penampungan/pembinaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis (gepeng). Baik anak jalanan maupun gepeng yang terazia pihak dinsos dan satpol PP akan dibina dengan diberi keterampilan berupa sablon, perbengkelan dan wirausaha kecil. Hanya saja hingga saat keberadaan rehabilitasi ini belum maksimal digunakan, lantaran pihak Dinsos terkendala personel dan biasa operasional.

Masalah anak jalanan ini bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial saja yang ikut berperan, melainkan cukup banyak aktifis dan yayasan merasa ikut andil bertanggung jawab dalam pembinaannya. Salah satu contoh upaya dilakukan rumah singgah milik Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB) Batam yang berlokasi di kampung utama. Sudah sejak lama mereka membina para anak jalanan ini, bahkan hingga disekolahkan segala.

Yayasan Pembinaan Asuhan Bunda (YPAB) setiap tahunnya selalu mendata anak jalanan dan kurang mampu untuk diberikan beasiswa sekolah. Saat ini YPAB sendiri telah mempunyai 180 orang anak asuh yang dibawah asuhan rumah singgah YPAB. Dalam mengelola anjal ini YPAB sendiri banyak sekali menerima bantuan dari pihak swsta baik dari dalam mapun luar negeri. Untuk bantuan dari luar negeri YPAB menerima bantuan dari Singapore Club dan dari Belanda.

Berita tersebut dipublikasikan pada tahun 2010, di tahun 2016 sendiri pemerintah Kota Batam telah mendata Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di

Kota Batam. Dari data tersebut terlihat berapa jumlah anak terlantar dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Dari tersebut mencerminkan jumlah anak terlantar di Kota Batam mengalami penurunan yang signifikan jumlahnya. Pada tahun 2012 jumlah anak terlantar berjumlah 1.943 mengalami penurunan drastis sampai pada angka 109 di tahun 2015.

Data Jumlah PMKS dapat digambarkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Batam

Jumlah PMKS yang ada		2011	2012	2013	2014	2015
A	Wanita Tuna Susila	2676	2621	2621	1867	2157
B	Waria	536	522	522	483	266
C	Paca	566	566	324	809	809
C.1	Paca yang diberi bantuan	N/A	60	56	0	0
D	Eks Paca kronis	0	0	0	0	0
E	Pekerja Migran	233	312	118	0	0
E.1	Pekerja Migran yang diberi bantuan	63	125	118	118	139
F	Keluarga Veteran	29	29	19	19	0
G	Anak Terlantar	0	1943	208	208	109
G.1	Anak terlantar yang diberi bantuan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
H	Orang Gila	37	50	0	0	50
I	Lansia/ Miskin	936	600	600	600	600
J	Gepeng	261	250	50	250	150
K	Korban Bencana	52	0	94	170	315
K.1	Korban bencana yang diberi Bantuan	1150	650	1000	3286	1800
L	Koms Adat Terpencil	612	0	612	7	7
M	Rumah Tak Layak Huni	3000	696	696	1714	898
M.1	RTHS yang direnovasi	100	300	696	816	747
N	Eks Korban Napza	0	0	0	0	0
O	Eks Napi	0	92	0	0	0
P	Wanita Rawan Sosial	286	286	539	0	0
Jumlah Total PMKS yang ada		8991	6135	29074	10918	8028

Jumlah Total PMKS yang tertangani	1113	1135	1870	5968	3017
Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	14.60	18.50	6.43	54.66	37.58

Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam

4. Kota Yogyakarta

Dalam penelitian Aminatun (2007) dalam (Clara R.P. Ajisukmo, 2012) penelitiannya di Yogyakarta yang mengkaji Pengaruh Kebutuhan Dasar Yaitu Kebutuhan Fisik, Psikis, dan Sosial pada Anak Jalanan yang Tinggal Bersama Orang tua dan yang Tidak Tinggal Bersama Orang Tua. Hasil penelitiannya menjumpai bahwa anak jalanan yang tinggal bersama orang tua dapat memenuhi kebutuhan dasarnya lebih baik dari pada anak jalanan yang tidak bersama orang tua mereka. Oleh karena itu, penanganan anak jalanan yang tinggal dengan orang tua perlu dibedakan dari anak jalanan yang tidak tinggal dengan orang tua.

Dalam penelitian ini kebutuhan dasar fisik mencakup kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Kebutuhan psikis termasuk kualitas hubungan dengan orang tua, kesempatan beribadah, kasih sayang dari orang tua dan respon dari orang tua ketika anak dalam keadaan sakit. Sedangkan kebutuhan sosial mencakup kesempatan bermain dengan teman sebaya, hubungan dengan teman di lingkungannya, dan kegiatan di lingkungan tempat tinggal. Dari penelitian-penelitian tersebut di atas ditunjukkan bahwa kemiskinan dan ketidak hadirannya orang tua merupakan malapetaka bagi anak. Oleh karena itu upaya untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi anak-anak dari keluarga miskin, bukan hanya penting bagi anak dan keluarga saja. Lebih dari pada itu, upaya perlindungan kepada anak-anak dari masyarakat miskin merupakan upaya untuk menyelamatkan suatu bangsa.

Salah satu bentuk perlindungan dan dukungan kepada anak miskin adalah program pendidikan luar sekolah bagi anak-anak yang putus sekolah. Anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus pada umumnya anak yang berasal dari keluarga miskin sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia sejak lama. Misalnya dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No.73 tahun 1993, tentang program paket A dan B. Anak yang putus sekolah dasar dapat mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga non pemerintah untuk kemudian memperoleh ijazah yang disetarakan dengan tingkat sekolah dasar untuk program paket A, dan ijazah sekolah menengah pertama untuk program paket B.

Bukti lain dari tanggung jawab pemerintah terhadap pendidikan untuk anak yang putus sekolah dan yang membutuhkan perlindungan khusus adalah dengan mencanangkan wajib belajar 9 tahun dengan diungkapkannya UU Sisdiknas pada tahun 2003, dan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tahun 2005 sebagai upaya percepatan program wajib belajar 9 tahun (Departemen Pendidikan Nasional 2009). Namun demikian dalam kenyataannya berbagai paket kebijakan sehubungan dengan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin masih belum mapu mengangkat derajat kehidupan dan melindungi mereka.

Program paket A dan paket B yang merupakan program pendidikan luar sekolah bagi anak yang putus sekolah, dalam kenyataannya masih belum banyak dimanfaatkan. Salah satu faktor yang ikut mempengaruhi rendahnya minat anak-anak putus sekolah untuk mengikuti program paket A dan B adalah tidak mudahnya pengakuan kesetaraan ijazah yang dikeluarkan dari program paket A dan B oleh sekolah formal. Ajisukmo (2009) dalam penelitiannya juga melaporkan bahwa program pendidikan luar sekolah bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (termasuk di dalamnya pekerja anak dan anak jalanan), kurang menarik dan tidak relevan dengan minat, kebutuhan dan karakteristik mereka, misalnya mobilitas anak jalanan yang tinggi dan waktu yang tersedia untuk belajar bagi pekerja anak. Selain itu, karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, maka pendidikan luar sekolah yang dirancang dan diselenggarakan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) sering kali tidak cukup bervariasi sehingga tidak cukup optimal dalam memfasilitasi perkembangan kemampuan dan keribadian anak jalanan dan pekerja anak di Yogyakarta.

SIMPULAN

Kebijakan dan program anak jalanan di beberapa daerah di Indonesia seperti Bandung, Makassar, Bandung dan Yogyakarta merupakai mata rantai dari persoalan kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketimpangan pembangunan, akses pendidikan yang tidak adil di Kota Besar. Persoalan anak jalanman di BeberpaKota Besar menjadi masalah pelik yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. karena kebijakan dan program pembinaan anak jalanan mampu memutus mata rantai kesadaran, morah dan menghindari anak jalanan terjun ke dalam arena lingkungan kriminalitas atau pergaulan yang salah. Model kebijan dan program yang dilakukan oleh Kota Bandung, Makassar, Batam dan Jogya adalah solusi agar eksploitasi terhdapa anak jalanan dapat dikurangi ssecara sistematis. Keberhsila angkaan penurunan anak jalanan di Kota Besar seperti di di Batam dan Bandung tersebut tidak lepas dari model kebijakan dan program yang

tepat terhadap pembinaan anak jalanan. Namun bukan berarti anak jalanan tidak lepas dari permasalahan sosial yang jika tidak dilakukn pembinaan secara berkala maka permasalahan anak jalanan akan terus ada dan meresahkan masyarakat apalagi sudah mengarah pada pemerasan dan pergaulan bebas dan lain sebagainya. Secara garis besarnya dari permasalahan anak jalan di berbagai kota tersebut yang menjadi kunci pembinaan anak ajalanan adalah adanya kemauan dan political will dari pemerintah dengan anggaran yang memadai dan program pembinaan pendidikan yang melahirkan skill dan keterampilan sehingga anak jalanan bukan lagi hidup di jalanan tapi memikirkan masa depan yang jauh lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anasiru, R. (2011). Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan di Kota Makassar. *Sossiokonsepsia*, 16(02), 175–186.
- Apit Sekar Setyadani. (2013). Perilaku Kesehatan Reproduksi Pada Anak Jalanan Dengan Seks Aktif di Kota Semarang. *Kesehatan Masyarakat*, 9(1), 30–36.
- Clara R.P. Ajiuksmo. (2012). Faktor-Faktor Penting Dalam Merancang Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Anak Jalanan dan Pekerja Anak. *Makara, Sosial Humaniora*, 16(1), 36–48.
- Haluankepri.com. (2010). Tak Cukup Hanya Rehabilitassi dan Rumah Singgah Saja.
- Indra Gunawan. (2014). *Implementasi Kebijakan Program Layanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Anak Jalanan dan Anak Terlantar di Dinas Sosial Kota Bengkulu*. Bengkulu.
- Nuraisyah, fisipol2014. blogspot. co. (2014). Kehidupan Anak Jalanan di Kota Batam.
- Pengertian Anak Jalanan. (2016). Retrieved July 24, 2016, from Pengertian-

menurut.blogspot.co.id/2016/01/pengertian-anak-jalanan-menurut-ahli.html?m=1

Tjahjorini, S., Slamet, M., S.Asngari, P., & Susanto, D. (2005). Persepsi Anak Jalanan Terhadap Bimbingan Sosial Melalui Rumah Singgah Di Kota Madya Bandung. *Penyuluhan, 1*(1).

Yudiatmaja, W. E. (2013). Ekonomi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Anak Jalanan di Kota Padang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 1*(1), 1–8.